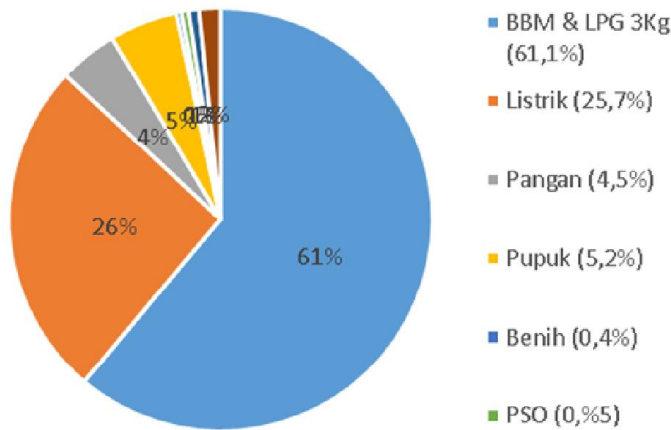




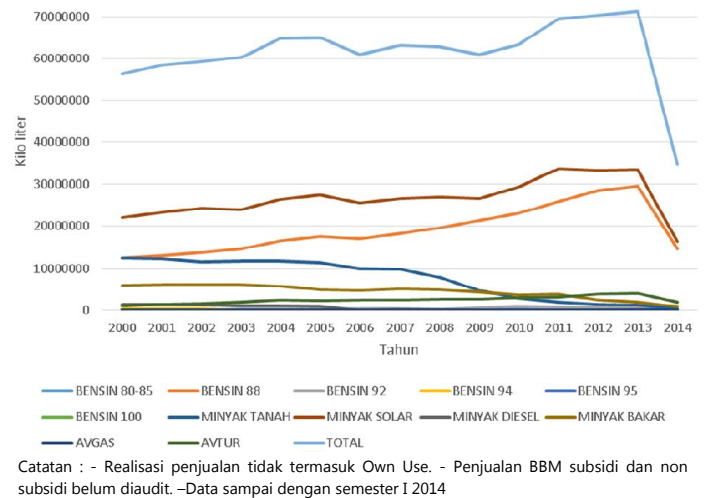
## STRATEGI PEMETINTAH MENGHAPUS SUBSIDI BBM RON 88

Rencana pemerintah mengeluarkan premium jenis baru pada Mei mendatang menimbulkan polemik. Bahan bakar baru tersebut bernama Pertalite yaitu premium dengan kadar RON antara premium bersubsidi dengan pertamax (88~92). Pertalite diharapkan bisa menjadi transisi sebelum premium RON 88 benar-benar dihapuskan. Penghapusan produksi RON 88 ini merupakan usaha pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah harus: 1) mampu mengendalikan inflasi yang terjadi akibat penghapusan subsidi premium RON 88 dengan mengendalikan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang terdampak; 2) membuat mekanisme pemberian insentif bagi angkutan umum agar tetap murah dan meningkatkan kenyamanannya; 3) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keuntungan RON yang lebih tinggi terhadap kondisi mesin dan lingkungan.

**Subsidi BBM:** Hingga tahun 2014 subsidi mencapai Rp 403 Triliun dimana 61% adalah subsidi BBM dan sisanya subsidi non energi. 90% BBM digunakan di sektor transportasi dimana separuhnya merupakan kendaraan pribadi roda empat yang hampir seluruhnya dimiliki kalangan menengah keatas. Berdasarkan Volatilitas Subsidi Energi dari Kementerian Keuangan, kebutuhan subsidi BBM merupakan risiko fiskal terbesar. Faktor risiko makro atas penambahan kebutuhan subsidi BBM yaitu **harga minyak** dan **nilai tukar mata uang**, dimana tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, sehingga sangat berbahaya bagi ketahanan energi Indonesia.



Gambar 1. Anggaran Subsidi Tahun 2014



Gambar 2. Realisasi Penjualan BBM di Seluruh Indonesia

**Manfaat RON Yang Lebih Tinggi:** 1) Kadar emisi menjadi rendah sehingga lebih ramah lingkungan; 2) Mesin menjadi lebih tahan lama; 3) Penggunaan bahan bakar lebih efisien.

**Dampak Dari Penghapusan BBM Bersubsidi Terhadap Ekonomi Makro Indonesia:** 1) inflasi harga secara umum, termasuk harga bahan pokok dan tarif transportasi umum; 2) harga BBM yang ada di pasaran akan lebih tinggi daripada harga BBM saat ini; 3) potensi perlambatan ekonomi di semua sektor.

**Rencana Pemerintah:** 1) Peningkatan kapasitas kilang minyak; 2) Peningkatan kualitas output kilang minyak, 3) Regulasi harga BBM diperlukan agar tercapai rasionalisasi tarif sesuai harga keekonomiannya untuk efisiensi energi; dan 4) Peningkatan kesehatan keuangan badan usaha (Pertamina). Hal ini dilakukan mengingat kebijakan harga BBM memberatkan keuangan negara sekaligus menghalangi upaya diversifikasi dan konservasi energi.

**Pengaruh dari rencana Pemerintah:** 1) Pengurangan impor BBM; 2) Subsidi BBM dapat dialihkan ke subsidi non energi yang langsung mengenai masyarakat misalnya pupuk, benih, dan pangan untuk mengendalikan inflasi; 3) Dana subsidi juga dapat dialihkan sebagai pendanaan percepatan pembangunan pembangkit listrik untuk pemenuhan target 35.000 MW terutama untuk energi terbarukan sesuai visi RPJMN 2015-2019 agar Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

**Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, RPJMN 2015-2019, PT Pertamina, Bank Indonesia**